



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG  
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN  
KODE REKENING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya ;
  - b. bahwa berhubung ada penyesuaian Kode Rekening dalam penyusunan APBD, maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening perlu diadakan peninjauan kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN KODE REKENING.**

**BAB I**

**STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**Pasal 1**

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah ;

- b. Belanja Daerah ;
- c. Pembiayaan Daerah.

## Pasal 2

- ( 1 ) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- ( 2 ) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 3 ) Struktur APBD yang di klisifikan menurut urusan Pemerintahan ✓ Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung beserta kode rekeningnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- ( 1 ) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- ( 2 ) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- ( 3 ) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

## Pasal 4

- ( 1 ) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, klompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- ( 2 ) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, klompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- ( 3 ) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, klompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.



**BAB II**  
**PENDAPATAN DAERAH**

**Pasal 5**

- ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dikelompokkan atas
  - a. Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. Dana Perimbangan ;dan
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah
- ( 2 ) Setiap Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan.
- ( 3 ) Setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- ( 4 ) Setiap jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan.
- ( 5 ) Setiap jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan.

**Pasal 6**

- ( 1 ) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas ;
  - a. dana bagi hasil;
  - b. dana alokasi umum; dan
  - c. dana alokasi khusus.
- ( 2 ) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
  - a. bagi hasil pajak; dan
  - b. bagi hasil bukan pajak.
- ( 3 ) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- ( 4 ) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- ( 5 ) Struktur APBD klasifikasi Pendapatan Daerah beserta kode rekeningnya tercantum dalam lampiran II,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**BELANJA DAERAH**

**Pasal 7**

- ( 1 ) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

- ( 2 ) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
- ( 3 ) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- ( 1 ) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :
  - a. belanja tidak langsung; dan
  - b. belanja langsung.
- ( 2 ) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- ( 3 ) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **Pasal 9**

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

#### **Pasal 10**

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa

sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

#### **Pasal 12**

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.
- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
- (4) Struktur APBD Klasifikasi Belanja Daerah beserta kode rekeningnya, tercantum dalam lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **Pasal 13**

1. Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
2. Struktur APBD klasifikasi Pembiayaan beserta Kode Rekeningnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan:  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Klungkung.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA



Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA



BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN KODE REKENING

Kode Struktur APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01 . 1.26.02	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum
<b>1.05</b>	<b>Penataan Ruang</b>
1.05 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum
1.05 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>1.06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>
1.06 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>1.07</b>	<b>Perhubungan</b>
1.07 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
<b>1.08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>
1.08 . 1.08.01	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08 . 1.08.02	Kantor Lingkungan Hidup
<b>1.10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
1.10 . 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>1.11</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>
1.11 . 1.11.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
<b>1.12</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>
1.12 . 1.11.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
<b>1.13</b>	<b>Sosial</b>
1.13 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>1.14</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
1.14 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>1.15</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
1.15 . 1.15.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
<b>1.16</b>	<b>Penanaman Modal</b>
1.16 . 1.16.01	Kantor Penanaman Modal



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
<b>1.17</b>	<b>Kebudayaan</b>
1.17 . 1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>1.19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>
1.19 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.19 . 1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>1.20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>
1.20 . 1.11.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
1.20 . 1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.20 . 1.20.02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03	Sekretariat Daerah
1.20 . 1.20.04	Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.20 . 1.20.06	Inspektorat
1.20 . 1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.08	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.20 . 1.20.09	Kecamatan Klungkung
1.20 . 1.20.10	Kecamatan Banjarangkan
1.20 . 1.20.11	Kecamatan Nusa Penida
1.20 . 1.20.12	Kecamatan Dawan
1.20 . 1.20.16	Kelurahan Semarapura Kaja
1.20 . 1.20.17	Kelurahan Semarapura Kangin
1.20 . 1.20.18	Kelurahan Semarapura Kauh
1.20 . 1.20.19	Kelurahan Semarapura Tengah
1.20 . 1.20.20	Kelurahan Semarapura Klod
1.20 . 1.20.21	Kelurahan Semarapura Klod Kangin
<b>1.21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>
1.21 . 1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
<b>1.22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1.22 . 1.11.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
<b>1.24</b>	<b>Kearsipan</b>
1.24 . 1.26.02	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
<b>1.25</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
1.25 . 1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.25 . 1.20.03	Sekretariat Daerah
<b>1.26</b>	<b>Perpustakaan</b>
1.26.1.26.02	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
<b>2</b>	<b>Urusan Pilihan</b>
<b>2.01</b>	<b>Pertanian</b>
2.01 . 1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2.01 . 2.01.05	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2.01 . 2.05.02	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
<b>2.02</b>	<b>Kehutanan</b>
2.02. 2.01.05	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
<b>2.04</b>	<b>Pariwisata</b>
2.04. 1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2.05</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
2.05. 2.05.02	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
<b>2.06</b>	<b>Perdagangan</b>
2.06. 1.15.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
<b>2.07</b>	<b>Industri</b>
2.07. 1.15.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
<b>2.08</b>	<b>Ketransmigrasian</b>
2.08. 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi
<b>2.02</b>	<b>Kehutanan</b>
2.02 . 1.08.05	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup
<b>2.03</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
2.03 . 1.08.05	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup
<b>2.04</b>	<b>Pariwisata</b>
2.04 . 1.17.03	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2.05</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
2.05 . 2.05.02	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
<b>2.06</b>	<b>Perdagangan</b>
2.06 . 2.06.03	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>2.07</b>	<b>Perindustrian</b>
2.07 . 2.06.03	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>2.08</b>	<b>Transmigrasi</b>
2.08 . 1.10.02	Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil

BUPATI KLUNGKUNG

I WAYAN CANDRA



Kode Rekening Struktur APBD Klasifikasi Pendapatan Daerah

Kode Rekening					Uraian
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>
4	1				<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
4	1	1			<b>Hasil Pajak Daerah</b>
4	1	1	01		<b>Pajak Hotel</b>
4	1	1	01	01	Hotel Bintang Lima Berlian
4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima
4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu
4	1	1	01	10	Motel
4	1	1	01	11	Cottage
4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
4	1	1	01	13	Wisma Pariwisata
4	1	1	02		<b>Pajak Restoran</b>
4	1	1	02	01	Restoran
4	1	1	02	02	Rumah Makan
4	1	1	02	03	Café
4	1	1	02	04	Kantin
4	1	1	02	05	Katering
4	1	1	02	06	Warung
4	1	1	03		<b>Pajak Hiburan</b>
4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop
4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana
4	1	1	03	03	Kontes Kecantikan
4	1	1	03	04	Kontes Binaraga
4	1	1	03	05	Pameran
4	1	1	03	06	Diskotik
4	1	1	03	07	Karaoke
4	1	1	03	08	Klub Malam
4	1	1	03	09	Sirkus/akrobat/sulap
4	1	1	03	10	Permainan Bilyar
4	1	1	03	11	Permainan Golf
4	1	1	03	12	Permainan Bowling
4	1	1	03	13	Pacuan Kuda
4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan
4	1	1	03	16	Panti Pijat/Refleksi
4	1	1	03	17	Mandi Uap/spa
4	1	1	03	18	Pusat Kebugaran
4	1	1	03	19	Pertandingan Olahraga
4	1	1	04		<b>Pajak Reklame</b>
4	1	1	04	01	Reklame Papan/Bill Board/videotron/ megatron
4	1	1	04	02	Reklame Kain
4	1	1	04	03	Reklame Melekat/stiker
4	1	1	04	04	Reklame Selebaran
4	1	1	04	05	Reklame Berjalan
4	1	1	04	06	Reklame Udara
4	1	1	04	07	Reklame Apung

Kode Rekening					Uraian
4	1	1	04	08	Reklame Suara
4	1	1	04	09	Reklame Film/slide
4	1	1	04	10	Reklame Peragaan
4	1	1	05		<b>Pajak Penerangan Jalan</b>
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN
4	1	1	06		<b>Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</b>
4	1	1	06	01	Asbes
4	1	1	06	02	Batu Tulis
4	1	1	06	03	Batu setengah permata
4	1	1	06	04	Batu kapur
4	1	1	06	05	Batu Apung
4	1	1	06	06	Batu/pasir
4	1	1	07		<b>Pajak Parkir</b>
4	1	1	07	01	Pajak Parkir
4	1	1	08		<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>
4	1	1	08	01	Pajak Air Bawah Tanah
4	1	1	09		<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>
4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	10		<b>Pajak Lingkungan</b>
4	1	1	10	01	Pajak Lingkungan
4	1	1	11		<b>Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>
4	1	1	11	01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	1	2			<b>Hasil Retribusi Daerah</b>
4	1	2	01		<b>Retribusi Jasa Umum</b>
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	2	01	03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4	1	2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
4	1	2	01	08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	01	09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	01	10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	02		<b>Retribusi Jasa Usaha</b>
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	02	02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	02	04	Retribusi Terminal
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4	1	2	02	07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	02	08	Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	02	09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	2	02	10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4	1	2	02	11	Retribusi Penyebrangan di air
4	1	2	02	12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	2	02	13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	03		<b>Retribusi Perizinan tertentu</b>
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	03	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	03	03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek
4	1	2	03	05	Retribusi Izin Usaha Perikanan

Kode Rekening					Uraian
4	1	2	03	06	Retribusi ijin usaha perdagangan/industri
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>					
4	1	3	01		<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>
4	1	3	01	01	Bank Pembangunan Daerah Bali
4	1	3	01	02	Perusahaan Daerah Air Minum
4	1	3	01	03	Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala
<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b>					
4	1	3	02		<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b>
4	1	3	02	01	BUMN .....
<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>					
4	1	3	03		<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>
4	1	3	03	01	Koperasi
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>					
<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>					
4	1	4	01		<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>
4	1	4	01	01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4	1	4	01	03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas
4	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4	1	4	01	09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4	1	4	01	10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4	1	4	01	11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4	1	4	01	12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4	1	4	01	13	Penjualan hasil pertanian
4	1	4	01	14	Penjualan hasil kehutanan
4	1	4	01	15	Penjualan hasil perkebunan
4	1	4	01	16	Penjualan hasil peternakan
4	1	4	01	17	Penjualan hasil perikanan
4	1	4	01	18	Penjualan hasil sitaan
4	1	4	01	19	Penjualan hasil pengelolaan sarang burung walet
4	1	4	01	20	Penjualan kios
4	1	4	01	21	Penjualan los
<b>Penerimaan Jasa Giro</b>					
4	1	4	02		<b>Penerimaan Jasa Giro</b>
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah
4	1	4	02	02	Jasa Giro Pemegang Kas
4	1	4	02	03	Jasa Giro Dana Cadangan
<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>					
4	1	4	03		<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>
4	1	4	03	01	Rekening Deposito pada Bank Pembangunan Daerah
<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>					
4	1	4	04		<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>
4	1	4	04	01	Kerugian Uang Daerah
4	1	4	04	02	Kerugian Barang Daerah
<b>Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</b>					
4	1	4	05		<b>Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</b>
4	1	4	05	01	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas daerah
4	1	4	05	02	Penerimaan Potongan
4	1	4	05	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>					
4	1	4	06		<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>
4	1	4	06	01	Bidang Pendidikan
4	1	4	06	02	Bidang Kesehatan
4	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum
4	1	4	06	04	Bidang Perumahan Rakyat
4	1	4	06	05	Bidang Penataan Ruang
4	1	4	06	06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4	1	4	06	07	Bidang Perhubungan



Kode Rekening					Uraian
4	1	4	06	08	Bidang Lingkungan Hidup
4	1	4	06	09	Bidang Pertanahan
<b>Pendapatan Denda Pajak</b>					
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4	1	4	07	09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	4	07	10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>					
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>					
4	1	4	09	01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	09	02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4	1	4	09	03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>					
4	1	4	10	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	10	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	10	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	10	05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4	1	4	10	06	Pendapatan dari Pengembalian Belanja lainnya
<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>					
4	1	4	11	01	Fasilitas Sosial
4	1	4	11	02	Fasilitas Umum
<b>Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>					
4	1	4	12	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4	1	4	12	02	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4	1	4	12	03	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
<b>Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan</b>					
4	1	4	13	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4	1	4	13	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4	1	4	13	03	Angsuran uang hak pakai tempat berjualan
4	1	4	13	04	Angsuran dari pedagang atas persewaan stand pada pasar-pasar yang dibangun
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya</b>					
4	1	4	14	01	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya
<b>Dana Perimbangan</b>					
<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>					
<b>Bagi Hasil Pajak</b>					
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>					
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi


Kode Rekening					Uraian
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Perusahaan Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4	2	1	02	11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4	2	2			<b>Dana Alokasi Umum</b>
4	2	2	01		<b>Dana Alokasi Umum</b>
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum
4	2	3			<b>Dana Alokasi Khusus</b>
4	2	3	01		<b>Dana alokasi khusus</b>
4	2	3	01	01	Dana alokasi khusus bidang pendidikan
4	2	3	01	02	Dana alokasi khusus bidang kesehatan
4	2	3	01	03	Dana alokasi khusus bidang infrastruktur
4	2	3	01	04	Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan
4	2	3	01	05	Dana alokasi khusus bidang pertanian
4	2	3	01	06	Dana alokasi khusus bidang prasarana pemerintah daerah
4	2	3	01	07	Dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup
4	2	3	01	08	Dana alokasi khusus bidang Kependudukan
4	2	3	01	09	Dana alokasi khusus bidang Kehutanan
4	2	3	01	10	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
4	2	3	01	11	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
4	2	3	01	12	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4	2	4			<b>Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana</b>
4	2	4	01		<b>Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana</b>
4	2	4	01	01	Infrastruktur
4	2	4	01	02	Prasarana Pemerintahan
4	2	4	01	03	Transportasi
4	2	4	01	04	Pendidikan
4	2	4	01	05	Kesehatan
4	2	4	01	06	Pertanian
4	2	4	01	07	Perdagangan
4	2	4	01	08	Lingkungan hidup
4	3				<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>
4	3	1			<b>Pendapatan Hibah</b>
4	3	1	01		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>
4	3	1	01	01	Pemerintah
4	3	1	02		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya</b>
4	3	1	02	01	Pemerintah daerah
4	3	1	03		<b>Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri</b>
4	3	1	03	01	Badan/lembaga/organisasi swasta
4	3	1	04		<b>Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan</b>
4	3	1	04	01	Kelompok masyarakat/perorangan
4	3	1	05		<b>Pendapatan Hibah dari Luar Negeri</b>
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4	3	2			<b>Dana Darurat</b>
4	3	2	01		<b>Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam</b>
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

Kode Rekening					Uraian
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
4	3	3	01	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4	3	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4	3	3	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4	3	3	01	08	Bagi Hasil dari Pajak Hotel dan Restoran Provinsi
4	3	3	02		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	02	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	03		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4	3	3	03	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Badung
4	3	3	04		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4	3	3	04	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Denpasar
4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4	3	4	01		Dana Penyesuaian
4	3	4	01	01	Dana Penyesuaian
4	3	4	02		Dana Otonomi Khusus
4	3	4	02	01	Dana Otonomi Khusus
4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Provinsi
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bali
4	3	5	02		Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4	3	5	02	01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Badung
4	3	5	03		Bantuan Keuangan dari Kota
4	3	5	03	01	Bantuan Keuangan Dari Kota Denpasar

BUPATI KLUNGKUNG.

*I Wayan Candra*

I WAYAN CANDRA



Kode Rekening Struktur APBD Klasifikasi Belanja Daerah

Kode Rekening					Uraian
5					<b>BELANJA DAERAH</b>
5	1				<b>Belanja Tidak Langsung</b>
5	1	1			<b>Belanja Pegawai</b>
5	1	1	01		<b>Gaji dan Tunjangan</b>
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan
5	1	1	01	10	Uang Paket
5	1	1	01	11	Tunjangan Panitia Musyawarah
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01	13	Tunjangan Panitia Anggaran
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	19	Tunjangan Pengaman Persandian
5	1	1	02		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5	1	1	03		<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>
5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03	03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	04		<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>
5	1	1	04	01	Biaya pemungutan PBB
5	1	1	04	02	Biaya pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	05		<b>Belanja Penunjang Operasional</b>
5	1	1	05	01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	06		<b>Tambahan berdasarkan pertimbangan Obyek Lainnya</b>
5	1	1	06	01	Tambahan Penghasilan pemberian uang makan
5	1	1	06	02	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
5	1	1	06	03	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
5	1	1	07		<b>Biaya Jasa Pelayanan Medik</b>
5	1	1	07	01	Biaya jasa pelayanan medis
5	1	1	08		<b>Biaya pemungutan Retribusi Daerah</b>
5	1	1	08	01	Biaya pemungutan Retribusi Daerah

Kode Rekening					Uraian
5	1	2			<b>Belanja Bunga</b>
5	1	2	01		<b>Bunga Utang Pinjaman</b>
5	1	2	01	01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	2	01	02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	2	01	03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	2	01	04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	2	02		Bunga Utang Obligasi
5	1	2	02	01	Bunga Utang Obligasi
5	1	3			<b>Belanja Subsidi</b>
5	1	3	01		<b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga</b>
5	1	3	01	01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan ....
5	1	3	01	02	Belanja Subsidi kepada Lembaga ....
5	1	4			<b>Belanja Hibah</b>
5	1	4	01		<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>
5	1	4	01	01	Pemerintah Pusat
5	1	4	02		<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya</b>
5	1	4	02	01	Pemerintah Daerah
5	1	4	03		<b>Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa</b>
5	1	4	03	01	Pemerintahan Desa
5	1	4	04		<b>Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN</b>
5	1	4	04	01	Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5	1	4	05		<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>
5	1	4	05	01	Badan/lembaga/organisasi swasta
5	1	4	05	02	Organisasi kemasyarakatan
5	1	4	06		<b>Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>
5	1	4	06	01	Kelompok masyarakat/perorangan
5	1	5			<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
5	1	5	01		<b>Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan</b>
5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	01	02	Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan/kelompok/anggota masyarakat
5	1	5	02		<b>Belanja Bantuan Partai Politik</b>
5	1	5	02	01	Belanja Bantuan Partai Politik
5	1	6			<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>
5	1	6	01		<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi</b>
5	1	6	01	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5	1	6	02		<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>
5	1	6	02	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5	1	6	03		<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>
5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	1	6	04		<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>
5	1	6	04	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota ....
5	1	6	05		<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>
5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	1	7			<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>
5	1	7	01		<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</b>
5	1	7	01	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .....



Kode Rekening					Uraian
5	1	7	02		<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota</b>
5	1	7	02	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota .....
5	1	7	03		<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5	1	7	04		<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya</b>
5	1	7	04	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...
5	1	7	04	02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ...
5	1	7	04	03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
5	1	7	05		<b>Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik</b>
5	1	7	05	01	Belanja Bantuan Partai Politik
5	1	8			<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5	1	8	01		<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga
5	2				<b>Belanja Langsung</b>
5	2	1			<b>Belanja Pegawai</b>
5	2	1	01		<b>Honorarium PNS</b>
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	2	1	01	03	Honorarium petugas Pos Jaga
5	2	1	01	04	Honorarium Pelaksana Kegiatan
5	2	1	02		<b>Honorarium Non PNS</b>
5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5	2	1	03		<b>Uang Lembur</b>
5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS
5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS
5	2	1	04		<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>
5	2	1	04	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	2	1	04	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	2	1	04	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	2	1	04	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	2	1	05		<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>
5	2	1	05	01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5	2	1	05	02	Belanja sosialisasi
5	2	1	05	03	Belanja bimbingan teknis
5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
5	2	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender
5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos
5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	2	2	01	09	Belanja Sesajen
5	2	2	01	10	Belanja Penghargaan/Hadiah
5	2	2	01	11	Belanja Materi Pameran
5	2	2	01	12	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Kode Rekening					Uraian
5	2	2	01	13	Belanja bahan makanan RSU/Puskesmas
5	2	2	01	14	Belanja peralatan olah raga pakai habis
5	2	2	01	15	Belanja peralatan makanan dapur RSU/Puskesmas
<b>Belanja Bahan/Material</b>					
5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan
5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman
5	2	2	02	03	Belanja bibit ternak
5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan
5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia
5	2	2	02	06	Belanja bahan percontohan
<b>Belanja Jasa Kantor</b>					
5	2	2	03	01	Belanja telepon
5	2	2	03	02	Belanja air
5	2	2	03	03	Belanja listrik
5	2	2	03	04	Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah
5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet
5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman
5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi
5	2	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	2	2	03	10	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	2	2	03	11	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	2	2	03	12	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai
5	2	2	03	13	Belanja jasa transportasi dan akomodasi
5	2	2	03	14	Belanja Dokumentasi
5	2	2	03	15	Belanja Dekorasi
5	2	2	03	16	Belanja Publikasi
5	2	2	03	17	Belanja Pengumuman tender
<b>Belanja Premi Asuransi</b>					
5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>					
5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service
5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR
5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5	2	2	05	06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>					
5	2	2	06	01	Belanja cetak
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan
<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>					
5	2	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5	2	2	07	04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>					
5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5	2	2	08	02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5	2	2	08	03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>					
5	2	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	2	2	09	02	Belanja sewa Buldoser

Kode Rekening					Uraian
5	2	2	10		<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>
5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	2	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	2	2	10	04	Belanja sewa generator
5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	2	2	10	07	Belanja sewa sound system
5	2	2	10	08	Belanja sewa drum band
5	2	2	10	09	Belanja sewa alat-alat musik tradisional/modern
5	2	2	10	10	Belanja sewa lampu penerangan
5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>
5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat
5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu
5	2	2	11	04	Belanja makanan dan Minuman pelatihan/bintek
5	2	2	11	05	Belanja makanan ternak
5	2	2	11	06	Belanja makanan dan minuman rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati
5	2	2	12		<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>
5	2	2	12	01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	2	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	2	2	12	06	Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)
5	2	2	13		<b>Belanja Pakaian Kerja</b>
5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan
5	2	2	14		<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>
5	2	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI
5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah
5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional
5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga
5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5	2	2	16		<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>
5	2	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5	2	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5	2	2	17		<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>
5	2	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5	2	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5	2	2	17	03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5	2	2	18		<b>Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>
5	2	2	18	01	Belanja Pemeliharaan gedung/kantor
5	2	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Air kotor
5	2	2	18	03	Belanja Pemeliharaan rambu/marka jalan
5	2	2	18	04	Belanja Pemeliharaan rumah jabatan/dinas
5	2	2	19		<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor</b>
5	2	2	19	01	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5	2	2	19	02	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5	2	2	19	03	Belanja Pemeliharaan komputer
5	2	2	19	04	Belanja Pemeliharaan meubelair

Kode Rekening					Uraian
5	2	2	19	05	Belanja Pemeliharaan peralatan dapur
5	2	2	19	06	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio
5	2	2	19	07	Belanja Pemeliharaan alat-alat komunikasi
5	2	2	19	08	Belanja Pemeliharaan alat-alat ukur
5	2	2	19	09	Belanja Pemeliharaan alat-alat kedokteran
5	2	2	19	10	Belanja Pemeliharaan labotarium
5	2	2	19	11	Belanja Pemeliharaan jalan
5	2	2	19	12	Belanja Pemeliharaan jembatan
5	2	2	19	13	Belanja Pemeliharaan jaringan air
5	2	2	19	14	Belanja Pemeliharaan listrik dan telepon
5	2	2	19	15	Belanja Pemeliharaan buku/kepuustakaan
5	2	2	19	16	Belanja Pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
5	2	2	19	17	Belanja Pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman
5	2	2	19	18	Belanja Pemeliharaan alat-alat persenjataan
5	2	2	20		<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>
5	2	2	20	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	2	2	20	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	2	2	20	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	2	2	20	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	2	2	20	05	Belanja beasiswa tugas belajar Spesialis
5	2	2	21		<b>Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>
5	2	2	21	01	Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	22		<b>Belanja Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>
5	2	2	22	01	Belanja penggiling hasil pertanian
5	2	2	22	02	Belanja alat pengering gabah
5	2	2	22	03	Belanja mesin bajak
5	2	2	22	04	Belanja alat pertanian/peternakan
5	2	3			<b>Belanja Modal</b>
5	2	3	01		<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>
5	2	3	01	01	Belanja modal pengadaan tanah kantor
5	2	3	01	02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5	2	3	01	03	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5	2	3	01	04	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5	2	3	01	05	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5	2	3	01	06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5	2	3	01	07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5	2	3	01	08	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5	2	3	01	09	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5	2	3	01	10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5	2	3	01	11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5	2	3	01	12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5	2	3	01	13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal
5	2	3	01	14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga
5	2	3	01	15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5	2	3	01	16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5	2	3	01	17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5	2	3	01	18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar
5	2	3	01	19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5	2	3	01	20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman
5	2	3	01	21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5	2	3	01	22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah
5	2	3	01	23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5	2	3	01	24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan
5	2	3	01	25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian
5	2	3	01	26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
5	2	3	01	27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan
5	2	3	01	28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan



Kode Rekening					Uraian
5	2	3	01	29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan
5	2	3	01	30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5	2	3	01	31	Belanja modal pengadaan tanah hutan
5	2	3	01	32	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum irigasi/air limbah/air kotor/air bersih/air minum
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>					
5	2	3	02	01	Belanja modal pengadaan traktor
5	2	3	02	02	Belanja modal pengadaan buldozer
5	2	3	02	03	Belanja modal pengadaan stoom wals
5	2	3	02	04	Belanja modal pengadaan eskavator
5	2	3	02	05	Belanja modal pengadaan dump truk
5	2	3	02	06	Belanja modal pengadaan crane
5	2	3	02	07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan
5	2	3	02	08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen
5	2	3	02	09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5	2	3	02	10	Belanja modal pengadaan mesin pompa air
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>					
5	2	3	03	01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5	2	3	03	02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5	2	3	03	03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5	2	3	03	04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5	2	3	03	05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5	2	3	03	06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5	2	3	03	07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5	2	3	03	08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5	2	3	03	09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5	2	3	03	10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5	2	3	03	11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5	2	3	03	13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5	2	3	03	14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>					
5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerobak
5	2	3	04	02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5	2	3	04	03	Belanja modal pengadaan becak
5	2	3	04	04	Belanja modal pengadaan sepeda
5	2	3	04	05	Belanja modal pengadaan karavan
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor</b>					
5	2	3	05	01	Belanja modal pengadaan kapal motor
5	2	3	05	02	Belanja modal pengadaan kapal feri
5	2	3	05	03	Belanja modal pengadaan speed boat
5	2	3	05	04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel
5	2	3	05	05	Belanja modal pengadaan hydro foil
5	2	3	05	06	Belanja modal pengadaan jet foil
5	2	3	05	07	Belanja modal pengadaan kapal tug boat
5	2	3	05	08	Belanja modal pengadaan kapal tanker
5	2	3	05	09	Belanja modal pengadaan kapal kargo
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor</b>					
5	2	3	06	01	Belanja modal pengadaan perahu layar
5	2	3	06	02	Belanja modal pengadaan perahu sampan
5	2	3	06	03	Belanja modal pengadaan perahu tongkang
5	2	3	06	04	Belanja modal pengadaan perahu karet
5	2	3	06	05	Belanja modal pengadaan perahu rakit
5	2	3	06	06	Belanja modal pengadaan perahu sekoci
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara</b>					
5	2	3	07	01	Belanja modal pengadaan pesawat kargo
5	2	3	07	02	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang



Kode Rekening					Uraian
5	2	3	07	03	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter
5	2	3	07	04	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran
5	2	3	07	05	Belanja modal pengadaan pesawat capung
5	2	3	07	06	Belanja modal pengadaan pesawat terbang ampibi
5	2	3	07	07	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang
5	2	3	08		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>
5	2	3	08	01	Belanja modal pengadaan mesin las
5	2	3	08	02	Belanja modal pengadaan mesin bubut
5	2	3	08	03	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak
5	2	3	08	04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor
5	2	3	09		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>
5	2	3	09	01	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian
5	2	3	09	02	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah
5	2	3	09	03	Belanja modal pengadaan mesin bajak
5	2	3	09	04	Belanja modal pengadaan alat penetas
5	2	3	09	05	Belanja modal pengadaan alat pertanian/peternakan
5	2	3	10		<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>
5	2	3	10	01	Belanja modal pengadaan mesin tik
5	2	3	10	02	Belanja modal pengadaan mesin hitung
5	2	3	10	03	Belanja modal pengadaan mesin stensil
5	2	3	10	04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
5	2	3	10	05	Belanja modal pengadaan mesin cetak
5	2	3	10	06	Belanja modal pengadaan mesin jilid
5	2	3	10	07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas
5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
5	2	3	10	09	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik
5	2	3	10	10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik
5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
5	2	3	10	12	Belanja modal pengadaan AC
5	2	3	10	13	Belanja modal peralatan kebersihan
5	2	3	10	14	Belanja modal peralatan laminating
5	2	3	10	15	Belanja modal pengadaan alat absensi sidik jari
5	2	3	11		<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>
5	2	3	11	01	Belanja modal pengadaan meja gambar
5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari
5	2	3	11	03	Belanja modal pengadaan brankas
5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet
5	2	3	11	05	Belanja modal pengadaan white board
5	2	3	11	06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan papan informasi
5	2	3	11	08	Belanja modal pengadaan kipas angin
5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan TV
5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan karpet
5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan korden/vitrage
5	2	3	11	12	Belanja modal pengadaan rangkaian pohon imitasi/bunga imitasi
5	2	3	11	13	Belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor
5	2	3	12		<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>
5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server
5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC
5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book
5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer
5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner
5	2	3	12	06	Belanja modal pengadaan monitor/display
5	2	3	12	07	Belanja modal pengadaan CPU
5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

Kode Rekening					Uraian
5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
5	2	3	12	11	Belanja modal pengadaan software/Program komputer
5	2	3	13		<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>
5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja
5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat
5	2	3	13	03	Belanja modal pengadaan meja makan
5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja
5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat
5	2	3	13	06	Belanja modal pengadaan kursi makan
5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur
5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa
5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
5	2	3	13	10	Belanja modal pengadaan perlengkapan meja/kursi/tempat tidur/sofa
5	2	3	13	11	Belanja modal pengadaan meja sekolah, kursi sekolah, bangku sekolah
5	2	3	14		<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>
5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas
5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas
5	2	3	14	03	Belanja modal pengadaan lemari makan
5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser
5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas
5	2	3	14	06	Belanja modal pengadaan rak piring
5	2	3	14	07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5	2	3	14	08	Belanja modal perlengkapan dispenser/kulkas dapur rumah jabatan
5	2	3	14	09	Belanja modal pengadaan termos
5	2	3	15		<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>
5	2	3	15	01	Belanja modal pengadaan lampu hias
5	2	3	15	02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan rangkaian pohon imitasi/bunga imitasi
5	2	3	16		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>
5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera
5	2	3	16	02	Belanja modal pengadaan handycam
5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor
5	2	3	17		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>
5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon
5	2	3	17	02	Belanja modal pengadaan faximili
5	2	3	17	03	Belanja modal pengadaan radio SSB
5	2	3	17	04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5	2	3	17	05	Belanja modal pengadaan radio VHF
5	2	3	17	06	Belanja modal pengadaan radio UHF
5	2	3	17	07	Belanja modal pengadaan alat sandi
5	2	3	17	08	Belanja modal pengadaan sound system
5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan megaphone
5	2	3	17	10	Belanja modal pengadaan paging system
5	2	3	18		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>
5	2	3	18	01	Belanja modal pengadaan timbangan
5	2	3	18	02	Belanja modal pengadaan teodolite
5	2	3	18	03	Belanja modal pengadaan alat uji emisi
5	2	3	18	04	Belanja modal pengadaan alat GPS
5	2	3	18	05	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi
5	2	3	18	06	Belanja modal pengadaan bejana ukur
5	2	3	18	07	Belanja modal pengadaan barometer
5	2	3	18	08	Belanja modal pengadaan seismograph
5	2	3	18	09	Belanja modal pengadaan ultrasonograph
5	2	3	19		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>
5	2	3	19	01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Kode Rekening					Uraian
5	2	3	19	02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5	2	3	19	03	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT
5	2	3	19	04	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata
5	2	3	19	05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5	2	3	19	06	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak
5	2	3	19	07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5	2	3	19	08	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5	2	3	19	09	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5	2	3	19	10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5	2	3	19	11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5	2	3	19	12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5	2	3	19	13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
5	2	3	19	14	Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis
5	2	3	19	15	Belanja modal pengadaan alat-alat radiologi
5	2	3	20		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>
5	2	3	20	01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5	2	3	20	02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5	2	3	20	03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5	2	3	20	04	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5	2	3	20	05	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5	2	3	20	06	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5	2	3	20	07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5	2	3	20	08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5	2	3	21		<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>
5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
5	2	3	21	02	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over
5	2	3	21	03	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass
5	2	3	21	04	Belanja modal rambu/marka jalan
5	2	3	22		<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>
5	2	3	22	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung
5	2	3	22	02	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton
5	2	3	22	03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5	2	3	22	04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5	2	3	23		<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>
5	2	3	23	01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan
5	2	3	23	02	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk
5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
5	2	3	23	04	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5	2	3	23	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5	2	3	23	07	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir
5	2	3	23	08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air
5	2	3	23	09	Belanja modal pengadaan saluran air PAM
5	2	3	23	10	Belanja modal pengadaan konstruksi tanggul
5	2	3	23	11	Belanja modal pengadaan konstruksi Dermaga
5	2	3	23	12	Belanja modal pengadaan Borry
5	2	3	24		<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>
5	2	3	24	01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
5	2	3	24	02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman
5	2	3	24	03	Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota
5	2	3	25		<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>
5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5	2	3	25	02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
5	2	3	25	03	Belanja modal pengadaan instalasi media elektronik berlangganan

Kode Rekening					Uraian
5	2	3	26		<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>
5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5	2	3	26	02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5	2	3	26	03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5	2	3	26	04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5	2	3	26	05	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5	2	3	26	06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5	2	3	26	07	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan
5	2	3	26	08	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	26	09	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat olahraga
5	2	3	26	10	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah
5	2	3	26	11	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat ibadah
5	2	3	26	12	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung bungalow/penginapan/villa/hotel
5	2	3	26	13	Belanja Modal Pengadaan kontruksi/pembelian taman
5	2	3	27		<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>
5	2	3	27	01	Belanja modal pengadaan buku matematika
5	2	3	27	02	Belanja modal pengadaan buku fisika
5	2	3	27	03	Belanja modal pengadaan buku kimia
5	2	3	27	04	Belanja modal pengadaan buku biologi
5	2	3	27	05	Belanja modal pengadaan buku biografi
5	2	3	27	06	Belanja modal pengadaan buku geografi
5	2	3	27	07	Belanja modal pengadaan buku astronomi
5	2	3	27	08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi
5	2	3	27	09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra
5	2	3	27	10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan
5	2	3	27	11	Belanja modal pengadaan buku sejarah
5	2	3	27	12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
5	2	3	27	13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5	2	3	27	14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5	2	3	27	15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5	2	3	27	16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5	2	3	27	17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia
5	2	3	27	18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa
5	2	3	27	19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5	2	3	27	20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan
5	2	3	27	21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5	2	3	27	22	Belanja modal pengadaan buku naskah
5	2	3	27	23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5	2	3	27	24	Belanja modal pengadaan mikrofilm
5	2	3	27	25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe
5	2	3	28		<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>
5	2	3	28	01	Belanja modal pengadaan lukisan/foto
5	2	3	28	02	Belanja modal pengadaan patung
5	2	3	28	03	Belanja modal pengadaan ukiran
5	2	3	28	04	Belanja modal pengadaan pahatan
5	2	3	28	05	Belanja modal pengadaan batu alam
5	2	3	28	06	Belanja modal pengadaan maket/miniatur/diorama
5	2	3	28	07	Belanja modal pengadaan alat-alat musik tradisional/modern
5	2	3	29		<b>Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman</b>
5	2	3	29	01	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang
5	2	3	29	02	Belanja modal pengadaan ternak
5	2	3	29	03	Belanja modal pengadaan tanaman
5	2	3	30		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>
5	2	3	30	01	Belanja modal pengadaan senjata api
5	2	3	30	02	Belanja modal pengadaan radar
5	2	3	30	03	Belanja modal pengadaan mobil water canon
5	2	3	30	04	Belanja modal pengadaan borgol
5	2	3	30	05	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet



Kode Rekening					Uraian
5	2	3	30	06	Belanja modal pengadaan perisai/tameng
5	2	3	30	07	Belanja modal pengadaan detektor logam
5	2	3	30	08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru
5	2	3	30	09	Belanja modal pengadaan pentungan
5	2	3	30	10	Belanja modal pengadaan helm
5	2	3	30	11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene
5	2	3	30	12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter
5	2	3	31		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga</b>
5	2	3	31	01	Belanja modal pengadaan trade mill
5	2	3	31	02	Belanja modal pengadaan kursi pijat
5	2	3	31	03	Belanja modal pengadaan alat terapi kaki
5	2	3	32		<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan rumah tangga</b>
5	2	3	32	01	Belanja modal pengadaan setrika
5	2	3	32	02	Belanja modal pengadaan tempat jemuran
5	2	3	32	03	Belanja modal pengadaan mesin cuci


  
 BUPATI KLUNGKUNG
   

  
 I WAYAN CANDRA



Kode Rekening Struktur Anggaran Pembiayaan Daerah

Kode Rekening					Uraian
6					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
6	1				<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>
6	1	1			<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>
6	1	1	01		<b>Pelampauan penerimaan PAD</b>
6	1	1	01	01	Pajak Daerah
6	1	1	01	02	Retribusi Daerah
6	1	1	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	1	01	04	Lain-Lain PAD yang sah
6	1	1	02		<b>Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan</b>
6	1	1	02	01	Bagi Hasil Pajak
6	1	1	02	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6	1	1	02	03	Dana Alokasi Umum
6	1	1	02	04	Dana Alokasi Khusus
6	1	1	02	05	Dana Kontijensi/Dana Penyeimbang dari Pemerintah Pusat
6	1	1	02	06	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
6	1	1	02	07	Bantuan Keuangan dari Provinsi
6	1	1	03		<b>Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>
6	1	1	03	01	Dana darurat penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
6	1	1	03	02	Dana bagi hasil pajak dari Kabupaten Badung
6	1	1	03	03	Dana bagi hasil pajak dari Kota Denpasar
6	1	1	03	04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
6	1	1	03	05	Penerimaan Restribusi PPh Pasal 21
6	1	1	03	06	Penerimaan dari Kompensasi PPh Pasal 21
6	1	1	03	07	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
6	1	1	04		<b>Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya</b>
6	1	1	04	01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung
6	1	1	04	02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung
6	1	1	04	03	Belanja Barang dan Jasa
6	1	1	04	04	Belanja Modal
6	1	1	04	05	Belanja Bunga
6	1	1	04	06	Belanja Subsidi
6	1	1	04	07	Belanja Hibah
6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial
6	1	1	04	09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6	1	1	04	10	Belanja Bantuan Keuangan
6	1	1	04	11	Belanja Tidak Terduga
6	1	1	05		<b>Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan</b>
6	1	1	05	01	Uang jaminan .....
6	1	1	05	02	Potongan Taspen
6	1	1	05	03	Potongan Beras
6	1	1	05	04	Askes
6	1	1	05	05	Dst.....
6	1	1	06		<b>Kegiatan lanjutan</b>
6	1	1	06	01	Kegiatan lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
6	1	1	06	02	Dst.....
6	1	2			<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6	1	2	01		<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan nomor .....
6	1	2	01	02	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	3	01		Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6	1	3	01	01	BUMD ....
6	1	3	01	01	Dst.....
6	1	3	02		Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6	1	3	02	01	.....
6	1	3	02	02	Dst.....
6	1	4			<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
6	1	4	01		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah</b>
6	1	4	01	01	Penerusan pinjaman.....
6	1	4	01	02	Dst.....
6	1	4	02		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain</b>
6	1	4	02	01	Pemerintah daerah .....
6	1	4	02	02	Dst.....
6	1	4	03		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank</b>
6	1	4	03	01	Bank .....
6	1	4	03	02	Dst.....
6	1	4	04		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank</b>
6	1	4	04	01	Lembaga keuangan bukan bank .....
6	1	4	04	02	Dst.....
6	1	4	05		<b>Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah</b>
6	1	4	05	01	Obligasi atas nama ....
6	1	4	05	02	Obligasi nomor ....
6	1	4	05	03	Dst.....
6	1	5			<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>
6	1	5	01		<b>Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman</b>
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman ....
6	1	5	01	02	Dst.....
6	1	6			<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>
6	1	6	01		<b>Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah</b>
6	1	6	01	01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6	1	6	01	02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6	1	6	01	03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6	1	6	02		<b>Penerimaan piutang daerah dari pemerintah</b>
6	1	6	02	01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6	1	6	03		<b>Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain</b>
6	1	6	03	01	Pemerintah daerah .....
6	1	6	03	02	Dst.....
6	1	6	04		<b>Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank</b>
6	1	6	04	01	Bank .....
6	1	6	04	02	Dst.....
6	1	6	05		<b>Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank</b>
6	1	6	05	01	Lembaga keuangan bukan bank .....
6	1	6	05	02	Dst.....
6	1	7			<b>Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah</b>
6	1	7	01		<b>Penerimaan kembali penyertaan modal Badan usaha milik daerah</b>
6	1	7	01	01	Penerimaan kembali penerimaan penyertaan modal BUMD

Kode Rekening				Uraian
6	1	7	02	Penerimaan kembali penyertaan modal Badan usaha milik swasta
6	1	7	02 01	Penerimaan kembali penerimaan Koperasi (KUD/KSP/KSU)
6	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>
6	2	1		<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
6	2	1	01	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
6	2	1	01 01	Pembentukan Dana Cadangan nomor .....
6	2	1	01 02	Dst.....
6	2	2		<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>
6	2	2	01	<b>Badan usaha milik pemerintah (BUMN)</b>
6	2	2	01 01	BUMN .....
6	2	2	01 02	Dst.....
6	2	2	02	<b>Badan usaha milik daerah (BUMD)</b>
6	2	2	02 01	Bank Pembangunan Daerah Bali
6	2	2	02 02	Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bali
6	2	2	03	<b>Badan usaha milik swasta</b>
6	2	2	03 01	Koperasi (KUD/KSP/KSU)
6	2	2	03 02	Penjaminan kredit kepada UKM/Koperasi
6	2	3		<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
6	2	3	01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6	2	3	01 01	Penerusan pinjaman.....
6	2	3	01 02	Dst.....
6	2	3	02	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain</b>
6	2	3	02 01	Pemerintah daerah .....
6	2	3	02 01	Dst.....
6	2	3	03	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank</b>
6	2	3	03 01	Bank .....
6	2	3	03 02	Dst.....
6	2	3	04	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank</b>
6	2	3	04 01	Lembaga keuangan bukan bank .....
6	2	3	04 02	Dst.....
6	2	3	05	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>
6	2	3	05 01	Penerusan pinjaman.....
6	2	3	05 02	Dst.....
6	2	3	06	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain</b>
6	2	3	06 01	Pemerintah daerah .....
6	2	3	06 02	Dst.....
6	2	3	07	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank</b>
6	2	3	07 01	Bank .....
6	2	3	07 02	Dst.....
6	2	3	08	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank</b>
6	2	3	08 01	Lembaga keuangan bukan bank .....
6	2	3	08 02	Dst.....
6	2	3	09	<b>Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo</b>
6	2	3	09 01	Obligasi atas nama .....
6	2	3	09 02	Obligasi nomor .....
6	2	3	09 03	Dst.....

Kode Rekening					Uraian
6	2	3	10		<b>Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo</b>
6	2	3	10	01	Obligasi atas nama .....
6	2	3	10	02	Obligasi nomor .....
6	2	3	10	03	Dst.....
6	2	4			<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
6	2	4	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
6	2	4	01	01	Pemerintah
6	2	4	02		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain</b>
6	2	4	02	01	Pemerintah daerah .....
6	2	4	02	02	Dst.....
6	3				<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>
6	3	1			<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>
6	3	1	01		<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>
6	3	1	01	01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

